

IDEOLOGI DALAM SURAT EDARAN PPKM DARURAT TENTANG COVID-19 DI SURABAYA (KAJIAN ANALISIS WACANA KRITIS FAIRCLOUGH)

Yopi Lutfi Subargo¹, Yarno²

¹Universitas 45 Surabaya

²Universitas Muhammadiyah Surabaya

¹yopi.lutfi@univ45sby.ac.id, ²yarnopbsi@fkip.um-surabaya.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan struktur teks (mikrostruktural), praktik wacana (mesostruktural), dan praktik sosiokultural (mikrostruktural) terhadap substansi teks surat edaran tersebut. Pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough yang dikolaborasikan dengan teori semiotika sosial M.A.K. Halliday untuk menemukan kedalaman makna teks. Data penelitian diambil dari dokumen SE PPKM Darurat tersebut di laman resmi Pemkot Surabaya. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa 1) struktur teks berbentuk larangan, hukuman, imbauan, edukasi, dan informasi, 2) praktik wacana meliputi identitas kaum atas, berkuasa, dan kaum bawah, masyarakat lemah, dan tertindas, dan 3) dimensi praktik sosial budaya menunjukkan bahwa kebijakan walikota Surabaya memaparkan berbagai dampak: a) marginalisasi masyarakat, b) dominasi sosial, dan c) *social wrong* karena interaksi praktik sosial berjalan tidak seimbang sehingga menimbulkan aksi perlawanan.

Katakunci: analisis wacana kritis, Covid-19, ideologi, surat edaran walikota

ABSTRACT

This study aims to describe the structure of the text (microstructural), discourse practices (mesostructural), and sociocultural practices (microstructural) on the substance of the circular letter. Norman Fairclough's critical discourse analysis approach in collaboration with M.A.K.'s social semiotic theory. Halliday to find the depth of the meaning of the text. The research data was taken from the SE PPKM Emergency document on the official website of the Surabaya City Government. Based on the results of the analysis, it is concluded that 1) the structure of the text is in the form of prohibitions, punishments, appeals, education, and information, 2) the practice of discourse includes the identity of the upper, powerful, and lower class, the weak, and oppressed, and 3) the dimensions of socio-cultural practice show that the policy of the mayor of Surabaya describes various impacts: a) community marginalization, b) social domination, and c) social wrong because the interaction of social practices runs unbalanced, causing resistance actions.

Keywords: critical discourse analysis, Covid-19, ideology, mayor's circular

PENDAHULUAN

Wabah *coronavirus disease* (Covid-19) diketahui mulai muncul pada Desember 2019. Virus tersebut kali pertama ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Penyakit ini berkembang pesat dan menyebar ke

provinsi-provinsi lain di Cina. Juga merambah ke negara Korea Selatan, dan Thailand dalam waktu kurang dari sebulan. *World Health Organization* (WHO) pun mengumumkan secara resmi istilah gejala penyakit ini dengan nama

Coronavirus Disease (Covid-19), pada 11 Februari 2020. Penyebab munculnya penyakit ini diketahui berasal dari virus SARS-CoV-2.

Pandemi Covid-19 telah mengubah struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, warga diimbau untuk beradaptasi terhadap kebaruan budaya-budaya sehat. Proses adaptasi ini membutuhkan kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Salah satunya taat dengan aturan-aturan baru yang dibuat pemerintah. Namun, terdapat asinkronisasi sosial antara pemerintah sebagai pembuat produk kebijakan dan masyarakat pengonsumsi produk yang dihasilkan. Hal ini merupakan wujud dari percepatan transformasi struktur budaya yang muncul secara prematur.

Berdasarkan berita yang dilansir *Media Indonesia* pada 13 Juli 2021 (Suyanto, 2021), terdapat aksi-aksi penolakan yang dilakukan masyarakat. Misalnya, pelemparan batu kepada petugas dan perusakan penghalang keluar-masuk akses Suramadu. Pada 12 Juli 2021 detik.com memberitakan penolakan di kantor DPRD dan balaikota Surabaya. Aksi massa itu menunjukkan tulisan berbentuk protes terhadap kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat (Widiyana, 2021).

Ketidaksinkronan tersebut berawal dari keresahan masyarakat, terutama pengusaha kecil yang setiap

hari harus mencari nafkah. Acapkali terdengar keluhan mengapa usahanya dibatasi dan ditutup. Jika tidak patuh, usaha mereka akan ditutup secara paksa. Lebih ekstrem, tempat usahanya tidak diperbolehkan beroperasi lagi alias disegel. Hal ini terjadi pada jam buka-tutup, termasuk saat jam ramai pengunjung. Ketika itu satuan petugas Covid-19 menertibkan pengunjung dan pengelola tempat usaha. Petugas berbekal Surat Edaran PPKM Darurat Nomor 43/7787/436.8.4/2021 tentang Covid-19 di Surabaya.

Mengutip fakta dari *iNews.Jatim.id* (Tambayong & Haryono, 2021), kematian akibat Covid-19 pada Juni 2021 sebanyak 697 orang. Urgensi dikeluarkan PPKM Darurat bukan tanpa alasan. Pemerintah berupaya memutus penyebaran virus dengan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Dengan langkah ini, diharapkan perekonomian menjadi normal kembali. Namun, fenomena di lapangan berbanding terbalik. Masyarakat sebagai pelaku usaha mengalami kerugian permanen. Usahanya tidak berjalan mulus, bahkan berhenti. Modal usaha sudah habis, sedangkan tagihan bulanan harus terus dibayar. Sesuai dengan data Bank Indonesia, 87,5% UMKM terdampak akibat pandemi. Dari jumlah tersebut, 93,2% nya bergerak di bidang penjualan (News, 2021).

Terdapat tiga komponen yang terlibat dalam keputusan pengeluaran SE tersebut. Walikota sebagai pembuat kebijakan, petugas lapangan yang mengaplikasikan kebijakan, dan masyarakat sebagai pelaku usaha. Dalam hal ini terjadi proses komunikasi tiga arah. Jika komunikasi tidak berjalan secara seimbang, pasti muncul dampak negatif. Untuk itu, bahasa menjadi sarana penting dalam komunikasi, baik secara lisan maupun tulis.

Berdasarkan fenomena di atas penelitian ini berusaha mengungkap ideologi di balik teks SE tentang PPKM Darurat yang dikeluarkan oleh walikota Surabaya. Dokumen itu didekati dengan analisis tekstual (mikrostruktural), analisis praktik wacana (mesostruktural), dan dimensi praktik sosial budaya (makrostruktural). Dalam konteks ini wacana SE PPKM Darurat tersebut dimaknai sebagai pernyataan yang merepresentasikan suatu entitas dan relasi sosial, sekaligus mengonstruksi kaitan antara keduanya (Kusno, 2015).

Bahasa merupakan media dalam berinteraksi sosial untuk mentransformasikan pikiran, ide, konsep, dan perasaan (Chaer, 2007). Bahasa memiliki kandungan pemaknaan dan maksud berbeda jika berafiliasi dengan konteks. Sementara itu, linguistik merupakan salah satu ilmu yang membidangi unsur-unsur kebahasaan. Untuk melakukan kajian secara lebih

komperhensif, diperlukan analisis mendalam agar dapat mengetahui latar belakang produksi suatu teks.

Linguistik kritis merupakan kajian ilmu bahasa yang bertujuan mengeksplorasi relasi-relasi kuasa tersembunyi (*hidden power*) melalui proses-proses ideologis yang muncul dalam teks-teks lisan atau tulisan (Crystal, 1991). Analisis linguistik saja tidak cukup untuk merepresentasikan wacana kritis. Analisis wacana kritis tidak dapat diletakkan ke dalam ruang kosong yang hanya dianalisis dari perspektif kebahasaan (Darma, 2009). Diperlukan adanya relevansi dari sisi konteks. Konteks dimaknai sebagai entitas kebahasaan yang dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu. Termasuk di dalamnya, praktik kekuasaan. Analisis wacana kritis dianggap sesuai untuk menganalisis wacana kebijakan SE PPKM Darurat tersebut. Untuk itu, struktur-struktur linguistik dipergunakan untuk menyistematiskan dan mentransformasikan realitas kehidupan (Fauzan, 2014).

Analisis wacana kritis merupakan kajian tentang usaha kekuatan sosial, dominasi, dan ketimpangan yang direproduksi oleh teks yang berkaitan dengan konteks sosial dan politik. Untuk mengeksplorasi sebuah wacana, perlu diperhatikan beberapa unsur, seperti: (1) beberapa teks bahasa, baik tulis maupun lisan (2) praktik kewacanaan berupa produksi dan interpretasi teks, (3) praktik

sosiokultural, yaitu bentuk-bentuk perubahan pada masyarakat, institusi, kebudayaan yang mendeskripsikan bentuk dan makna suatu wacana alias dimensi wacana. Untuk itu, poin terpenting dalam menganalisis wacana secara kritis adalah dengan memperhatikan ketiga dimensi wacana tersebut. Ketiganya berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan (Santoso, 2006).

Selain ketiga substansi tersebut, dari sudut pandang analisis wacana kritis, wacana berkaitan erat dengan praktik ideologi atau potret ideologi tertentu (Santoso, 2006). Tentu terkandung suatu ideologi di balik produksi suatu teks. Berkaitan dengan ideologi dalam wacana, terdapat dua poin penting yang perlu diperhatikan. Pertama, ideologi bersifat sosial, bukan individu atau personal. Ideologi membutuhkan partisipan berupa kelompok atau masyarakat yang memperjuangkan dan mematuhi ideologi tersebut. Kedua, ideologi dipakai secara simultan dalam internal antara anggota kelompok. Ideologi selalu memberikan ruang jawaban tentang identitas suatu kelompok.

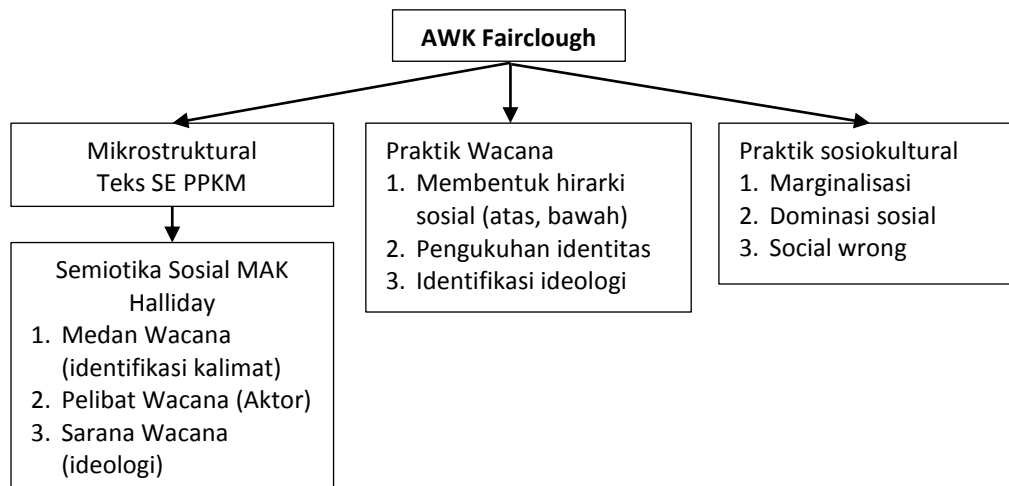
Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan analisis wacana kritis suatu teks. Pertama, penelitian berjudul *"Dimensi Sosial Dalam Novel Negeri Para Bedebah Karya Tere Liye (Perspektif Analisis Wacana Kritis)"* (Firmansyah, 2018). Dari penelitian pada 2018 ini disimpulkan bahwa

untuk menemukan muatan ideologi di dalam teks, penempatan bahasa tidak bisa dianalisis secara tertutup. Pengalisisannya harus memperhatikan konteks, khususnya bagaimana peran ideologi seseorang atau kelompok dalam membentuk wacana dalam teks.

Kedua, penelitian berjudul *"Wacana Perlawanan Persebaya 1927 terhadap PSSI"* (Saraswati & Sartini, 2017). Disimpulkan bahwa terdapat bentuk-bentuk perlawanan arek-arek bonek terhadap PSSI. Para bonek merasa kecewa karena hak-haknya direbut oleh PSSI. Di dalamnya juga terkandung unsur pragmatik untuk memengaruhi PSSI agar mengembalikan hak-hak mereka.

Ketiga, penelitian pada tahun 2020 dengan judul *"Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough terhadap Pemberitaan Jokowi Naikkan Luran BPJS di Tengah Pandemi"* (Kartikasari, 2020). Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa wacana merupakan bentuk interaksi. Oleh karena itu, penggunaan bahasa tutur dan tulis juga mencerminkan bentuk praktik sosial. Media berperan penting dalam praktik ideologi. Artinya, terdapat beberapa macam media penyajian dalam pemberitaan guna menarik minat pembaca.

Sebagai pedoman, kerangka berpikir penelitian ini dirangkum seperti di bawah ini.



Gambar 1. Kerangka berpikir penelitian

METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif-kualitatif. Untuk mendapatkan kekuatan komprehensif tentang analisis penelitian kualitatif, tahap penelitian memerlukan kekuatan akal yang merupakan sumber kemampuan analisis (Arikunto, 2010). Adapun pisau bedahnya menggunakan teknik analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Kajian utama ditumpukan pada data mikrostruktural (teks), mesostruktural (praktik wacana), dan makrostruktural (praktik sosiokultural).

Teks digunakan sebagai bahan utama dalam kajian penelitian ini. Untuk itu, metode analisis yang digunakan adalah analisis naskah paradigmatis dengan teori semiotika sosial (Halliday M. A., 1993). Tokoh ini berpendapat bahwa sebuah naskah mempunyai tiga unsur penting, yaitu: (1) medan wacana (cara produsen wacana memperlakukan peristiwa), (2)

pelibat wacana (orang-orang yang terlibat beserta atribut sosial dalam suatu wacana), dan (3) sarana wacana (cara produsen wacana dalam menggunakan bahasa dalam menggambarkan peristiwa). Metode ini sangat bermanfaat untuk menemukan bukti-bukti dalam naskah untuk menjawab permasalahan penelitian berupa tanda-tanda yang merepresentasikan ide dan gagasan teks.

PEMBAHASAN

Surat Edaran PPKM Darurat Nomor 443/7787/436.8.4/2021 tentang Covid-19 di Surabaya

Eksplanasi berkaitan dengan identifikasi kedudukan surat edaran dalam perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Surat edaran merupakan legislasi semu atau *beleidsregel* (kebijaksanaan) yang produksinya

bersumber pada kewenangan pejabat pemerintah untuk menjalankan sistem administratif. Keberadaan peraturan berupa surat edaran adalah bentuk konsekuensi negara berdasarkan hukum. Tujuan utama surat edaran adalah untuk kesejahteraan rakyat (*welfare state*) (Inggiz, Kushartono, & Amanita, 2019). Beberapa tugas pemerintahan dapat dilaksanakan jika pemerintah diberi keleluasaan membuat surat edaran sesuai dengan urgensi situasi dan kondisi (mendesak).

Peristiwa semakin masifnya angka kematian pasien Covid-19 membuat pemerintah secara serius berupaya meminimalisasi atau bahkan menghentikan tingkat penyebaran virus. Pada tanggal 3 Juli 2021, walikota Surabaya mengeluarkan surat edaran untuk dijadikan dasar regulasi status, pengaturan, dan upaya penanggulangan. Sebelumnya, surat edaran pernah dikeluarkan pada 20 Maret 2020 dengan nomor 360/ 3324/436.8.4/2020 (Ariefana, 2020). Substansi SE tersebut berupa imbauan kewaspadaan masyarakat terkait penyebaran Covid-19. Selain itu, surat edaran 21 September 2020 terkait dengan upaya memutus mata rantai Covid-19 dengan cara memperketat pendatang yang masuk ke Surabaya. Selanjutnya SE Nomor 443/5359/ 436.8.4/2021 diedarkan pada 24 Mei 2021 tentang mobilitas masyarakat pada hari libur Idul Adha dan SE yang lain berkaitan dengan kebijakan masyarakat dalam

menghadapi Covid-19 di Surabaya (Pemerintah Kota Surabaya, 2021).

Fokus kajian dalam teori wacana kritis Nourman Fairclough ini berfungsi untuk membuka tabir bermuatan ideologi di balik produksi teks. Analisis tersebut berusaha mengolaborasi kebahasaan (linguistik) dengan transformasi struktur sosial sehingga analisis wacana kritis disebut sebagai model perubahan sosial (*dialectical-relational approach/DRA*) (Saraswati & Sartini, 2017).

Melalui analisis teks dengan teori semiotika sosial Halliday, diketahui bahwa teks memiliki bentuk larangan, hukuman, imbauan, informasi, dan edukasi. Penemuan bentuk-bentuk tersebut merupakan rangkaian formasi terintegrasi yang berdampak secara psikis, sosiologis, dan ideologis. Hal ini sesuai dengan pendapat Nourman Fairclough bahwa wacana juga berimbas balik pada struktur sosial, serta berkontribusi pada pencapaian-pencapaian kesinambungan sosial dan perubahan sosial, karena antara wacana dan struktur-struktur sosial bersifat dialektis (Fairclough, 2003).

Bentuk-bentuk teks tersebut selanjutnya dianalisis dengan dimensi mikrostruktural, yaitu telaah terhadap pesan-pesan yang terdapat di dalam teks. Teori semiotika sosial Halliday digunakan untuk mengungkap makna dalam teks tersebut. Setelah itu dilakukan pemilahan wacana dan ideologi yang

terkandung teks. Tahap ini termasuk dalam dimensi mesostruktural atau praktik wacana. Kemudian, diadakan analisis dalam jangka cakupan lebih luas yang mempunyai relevansi dengan situasi, kondisi, dan dinamika ketika produsen teks mengeluarkan produk-produknya. Setelah melalui tahap dimensi-dimensi tersebut, pembahasan dilakukan berdasarkan teori terkait. Dengan demikian, analisis wacana kritis diperlukan untuk mengetahui isi teks dan cara penyampaian pesan itu melalui frasa, kalimat, dan metaforanya (Halwati, 2013).

Analisis Teks (*Mikrostruktural*)

Teks merupakan bentuk konstruksi dari fenomena-fenomena kewacanaan. Untuk itu, langkah utama mengetahui kedalaman makna pada teks diperlukan model Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough yang disebut dengan tahapan dimensi mikrostruktural (Caesareka & Nugroho, 2020). Dalam hal ini digunakan teori semiotika sosial untuk menemukan pesan-pesan dalam bentuk bahasa yang ada dalam teks. Bahasa merupakan bentuk representasi dunia yang dibangun secara sosial. Semiotik dijadikan media untuk memberi batasan terhadap perspektif yang berfungsi untuk melihat bahasa sebagai salah satu dari beberapa jumlah sistem pe-

maknaan yang bersama-sama membentuk budaya manusia.

Tujuan mengimplementasikan komponen semiotika sosial dari M.A.K. Halliday dan Ruqaiya dalam analisis isi teks adalah untuk mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan tiga unsur semiotika sosial, yaitu: *field of discourse* (medan wacana); *tenor of discourse* (pelibat wacana); dan *mode of discourse* (sarana wacana) (Hamad, 2005).

Field of discourse (medan wacana) bertujuan untuk mengetahui apa yang dijadikan wacana pada teks SE PPKM Darurat di Surabaya berkaitan dengan suatu peristiwa di masyarakat. Sedangkan untuk mengetahui siapa yang terlibat dalam teks SE tersebut berkaitan dengan identitas personal, seperti kedudukan, peran dan sifat orang-orang itu, diperlukan analisis *tenor of discourse* (pelibat wacana). Setelah itu, untuk mengetahui bagian yang diperankan oleh bahasa: bagaimana komunikator (teks SE), gaya bahasa yang digunakan untuk ilustrasi medan (situasi) dan pelibat (orang-orang yang dikutip) dibutuhkan analisis sarana wacana (*mode of discourse*). Praktisnya, dalam sarana wacana mengandung makna, citra, opini, dan motif. Hasil analisis teks dapat dilihat pada tabel 1 sampai dengan tabel 3 berikut ini.

Tabel 1. Medan wacana (*field discourses*) dalam SE PPKM di Surabaya

TEMUAN	KETERANGAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/ Pelatihan dilakukan secara daring/online... 2. untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional... 3. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara... 4. Melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan 5. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Pasal 212,216, 218. Ancaman sanksi ketika melawan,menghalang-halangi dan tidak mengikuti peraturan pemerintah akan dikenakan sanksi pidana atau denda... 6. Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya sesuai dengan kriteria level 4 (empat)... 7. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan 8. Pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:1) beraktivitas dari rumah saja, ... 9. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang... 10. Jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah)... 11. kritical seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya,.. 12. Ruang harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik... 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada teks poin (1), (2), (3), dan (4) berfungsi untuk menyatakan sebuah larangan. Larangan pada teks ditujukan kepada, obyek, seluruh lapisan masyarakat Satuan kalimat perkalimat dijelaskan secara detail dengan menyebutkan keterangan waktu, tempat, dan kondisi. 2. Teks pada Poin (5) diidentifikasi berbentuk hukuman/sanksi. Untuk memperkuat legitimasi kebijakan, Walikota Surabaya sebagai produsen teks menerapkan hukuman bagi pelanggar aturan berupa pidana dan denda. Kata sanksi, dengan penunjukan pasal-pasal hukum merupakan piranti baku dalam penerapan kebijakan jika memungkinkan terjadi pelanggaran. 3. Poin (6), dan (7) pada teks diidentifikasi berbentuk informasi, dengan memanfaatkan diksi informatif tentang status(zona merah, level 4). Sifat dari informasi pada teks adalah untuk menambah pengetahuan masyarakat sehingga dengan pengetahuan tersebut dapat memunculkan kesadaran dengan tujuan masyarakat akan berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang didapatkannya. 4. Pada poin (9), (10), dan (11) diidentifikasi berupa edukasi. Pada kalimat-kalimat tersebut pemerintah berusaha memberikan tuntunan dan pengetahuan tentang gaya hidup sehat dan perlunya pengetahuan tentang penyebaran Covid-19 agar bisa menghambat penyebaran virus. 5. Pada poin (12) dan (13) pada teks diidentifikasi berbentuk himbauan. Himbauan dari pemerintah berfungsi untuk memberi pandangan kepada masyarakat, agar dengan pandangan ini, masyarakat akan tergerak mengikuti pandangan tersebut dan menerimanya secara sadar atau tidak sadar.

Tabel 2. Pelibat wacana (*tenor of discourse*) dalam SE PPKM di Surabaya

TEMUAN	KETERANGAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Walikota Surabaya dan perangkatnya (lurah, RT, RW) 2. Petugas gabungan (Polri, TNI, Dishub, Satpol PP) 3. Tenaga kesehatan 	<p>Sebagai produsen utama teks adalah Walikota Surabaya, yang mempunyai kuasa penuh atas kebijakan-kebijakan, dengan melihat fenomena berbasis kemaslahatan masyarakat. Petugas gabungan merupakan perangkat Walikota untuk menjaga</p>

TEMUAN	KETERANGAN
4. Kejaksaaan 5. Pengusaha 6. Pengelola instansi 7. Warga	pengaplikasian kebijakan di lapangan. Pegawai lapangan berupaya menangani langsung pasien penderita. Kejaksaaan merupakan lembaga yang mengadili masyarakat ketika terjadi pelanggaran. Sedangkan pengusaha, pengelola instansi dan warga termasuk objek dari kebijakan, berperan sebagai penerima produk yang telah dihasilkan

Tabel 3. Sarana wacana (*mode of discourse*) dalam SE PPKM di Surabaya

TEMUAN	KETERANGAN
1. Melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan 2. ...sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini dikenakan sanksi ... 3. Walikota didukung penuh oleh TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM Darurat COVID-19 4. Ruang harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan.	Penyampaian diksi Pada teks diuraikan dengan lugas, mudah dimengerti. Semua bentuk kegiatan yang memunculkan kerumunan dilarang . Selain itu, peran bahasa digunakan untuk mempertegas poin(2) bahwa akan dikenai hukuman bagi pelanggar. Adapun untuk mempertegas pola pengaplikasian di lapangan, diksi yang dipilih dengan cara memperhalus (eufimisme) kalimat, seperti menggunakan kata-kata informasi poin(3) dengan menunjukkan kekuasaan (<i>show of force</i>) nama-nama perangkat yang disebutkan (TNI,POLRI, Kejaksaaan). Agar tidak terjadi pelanggaran yang menyebabkan penyebaran virus, pemerintah memberikan cara-cara tertentu. Kata-kata berbentuk edukasi berfungsi untuk mereduksi ketegangan dalam bentuk arahan atau pengetahuan tentang standart kesehatan. Sedangkan pada poin (4), merupakan pemilihan diksi berbentuk imbau agar masyarakat menerapkan lingkungan sehat

Berdasarkan interpretasi dalam teks, terdapat konstruksi yang ingin ditunjukkan oleh pemerintah adalah masyarakat diharapkan cepat beradaptasi dengan larangan tersebut. Tidak ada penambahan waktu pada hari penerbitan larangan. Semua bentuk pelanggaran terhadap larangan akan ditindak. Kebiasaan-kebiasaan tatap muka secara langsung dan berkeumun harus segera ditinggalkan. Karena itu, masyarakat dipaksa mengikuti peraturan mendadak tersebut. Kemungkinan pelanggaran jelas terjadi karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan mengubah struktur

sosial. Munculnya budaya baru untuk sementara dan menggantikan budaya lama niscaya membutuhkan waktu.

Beberapa narasi larangan pada teks tersebut menunjukkan dominasi konstruksi kekuasaan. Hal itu terpaparkan secara mendetail dalam subbab aturan yang memiliki substansi larangan bahwa setiap kegiatan yang menciptakan kerumunan akan dihukum. Beberapa bentuk larangan teridentifikasi. Jika poin larangan dilanggar, masyarakat akan terkena sanksi.

Tujuan sosialisasi kebijakan SE PPKM Darurat adalah agar muncul kesadaran kolektif untuk

memutuskan kemasifan penyebaran Covid-19. Untuk menjembatani perspektif masyarakat itu, pemerintah sebagai produsen teks berusaha menyinkronkan fenomena pandemi dengan transformasi budaya. Metodenya berupa penyampaian imbauan, edukasi, dan informasi melalui teks SE PPKM Darurat.

Penerapan sistem budaya baru membutuhkan jembatan dan panduan untuk mereduksi gesekan horizontal karena terjadinya perbedaan perspektif. Teks yang berisi imbauan, edukasi, dan informasi tersebut merupakan substansi krusial agar masyarakat mempunyai paradigma yang sejajar dengan urgensi konteks pandemi.

Internalisasi substansi imbauan, edukasi, dan informasi merupakan bentuk hegemoni dari beberapa percepatan ideologi yang harus tersampaikan kepada masyarakat. Realitas sosial memperingatkan adanya kemasifan penyebaran Covid-19. Untuk itu, pesan aturan harus bisa diterima dengan kesadaran logis.

Praktik Wacana (*Mesostruktural*)

Fungsi wacana digunakan untuk praktik sosial. Ini berarti bahwa analisis wacana bertujuan mengungkapkan peran praktik kewacanaan berupa berbagai hubungan sosial yang melibatkan kekuasaan yang tidak seimbang (Bungsu, 2019). Dalam hal ini, kekuasaan menjadi penentu susunan aturan dalam hubungannya dengan faktor lain,

seperti keluarga, sosial ekonomi, media komunikasi, pendidikan, dan ilmu pengetahuan.

Praktik kewacanaan berhubungan dengan produksi dan pemaknaan beberapa proses diskursif. Tahap kedua analisis wacana kritis ini dilakukan dengan langkah menginterpretasikan hubungan antara produksi dan interpretasi beberapa proses diskursif. Dua hal yang menjadi bahan kajian yaitu (1) pemaknaan teks, dan (2) pemaknaan konteks. Dalam interpretasi teks ada empat level wilayah interpretasi, yakni (a) wujud lahir ujaran, (b) makna tuturan, (c) koherensi lokal, (d) struktur teks. Untuk menginterpretasi konteks ada dua tingkat interpretasi, yaitu (a) konteks situasional, dan (b) konteks antarteks.

Kondisi sosial yang diungkapkan dalam teks merupakan bentuk hierarki, oposisi biner, yaitu atas dan bawah. Pemerintah, dalam hal ini walikota Surabaya, berperan pada posisi atas. Posisi bawah diduduki oleh masyarakat. Peran masing-masing identitas memiliki struktur sosial berbeda ketika memproduksi ideologi berusaha memengaruhi masyarakat sebagai pengonsumsi ideologi.

Teks SE PPKM Darurat menunjukkan bahwa walikota Surabaya memiliki kendali interaksional. Karena itu, terlihat identitas pemerintah sebagai pengatur alur ideologi dalam teks.

Adapun masyarakat sebagai pengonsumsi teks berada dalam posisi mematuhi ideologi tersebut. Paparan tersebut dapat ditemukan dalam teks berikut:

“Melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan”

Interpretasi pada diksi melarang, berarti ada aktor yang mempunyai kuasa untuk menyampaikan larangan, yaitu walikota Surabaya. Sementara, aktor yang dilarang harus mematuhi larangan tersebut, yaitu masyarakat. Terdapat tatanan yang tidak sepadan dalam sebuah struktur sosial. Selain itu, terdapat pengaruh kuat yang didistribusikan kepada masyarakat, oleh pemerintah, seperti terdapat dalam kalimat berikut ini:

“Dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan”

Optimalisasi dominasi berada pada pemerintah sebagai aktor utama pelaksanaan regulasi. Pemerintah dibantu oleh aktor-aktor lain yang berfungsi untuk menjaga stabilitas ideologi. Konstruksi ideologi didukung oleh jajaran pemerintah, seperti satgas gabungan, kejaksaan, dan nakes. Sedangkan masyarakat meliputi warga, pengusaha, dan

pemilik instansi yang tidak mempunyai kapasitas kuasa sama sekali.

Makrostruktural

Praktik sosiokultural merupakan interaksi antara teks dan struktur sosial yang dijematani oleh konteks sosial wacana. Wacana akan menjadi realitas, beroperasi secara sosial, sebagai bagian dari beberapa proses perjuangan masyarakat dan institusional. Analisis wacana kritis tahap ketiga ini adalah wujud langkah untuk menjelaskan hubungan beberapa fitur tekstual yang berbeda beserta kompleksitas proses wacana dengan proses transformasi sosiokultural. Termasuk di dalamnya perubahan masyarakat, institusional, dan kultural.

Menurut Fairclough (2003), tahap eksplanasi ini bertujuan untuk “memotret” wacana sebagai bagian dari praktik sosial dan proses sosial. Tahap ini juga mengarahkan bagaimana cara wacana itu didapatkan oleh struktur sosial. Termasuk di dalamnya bentuk-bentuk reproduksi yang memengaruhi wacana secara keseluruhan dan menopang, menggunakan, serta mengubah beberapa struktur tersebut.

Pemerintah Kota Surabaya mencoba beradaptasi terhadap terjangan penyebaran Covid-19, dengan melihat fenomena tingkat kematian dari dalam dan luar negeri. Begitu juga masyarakat diwajibkan

menyesuaikan kondisi baru yang dikonstruksi oleh pemerintah. Proses pengondisian itu merupakan bentuk-bentuk wacana yang dibangun oleh struktur sosial masing-masing.

Untuk membentuk realitas kesadaran ideologi, pemerintah berusaha menjembatani antar proses diskursif, seperti dalam kalimat berikut ini:

“Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease (Covid-19) serta mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya sesuai dengan kriteria level 4 (empat)”.

Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berusaha membuka paradigma logis kepada masyarakat tentang kondisi yang dialami. Untuk itu, diharapkan muncul permakluman atas perilaku sporadis akibat penetapan kriteria level empat. Dalam hal ini pemerintah mencoba menyampaikan pesan berupa informasi tentang situasi kewacanaan.

Bentuk kalimat lain yang berfungsi untuk menjembatani kompleksitas sosiokultural sebagai berikut:

“berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang

jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan.”

Bentuk imbauan pada kalimat tersebut merupakan sarana edukasi agar masyarakat tetap dapat beraktivitas sehari-hari. Namun, mereka disarankan untuk berinteraksi di luar ruangan

Interaksi para aktor yang melakukan praktik sosial ini berisiko mengalami gesekan. Untuk menghindari kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat, dibuatlah kalimat-kalimat peredam. Misalnya, berupa beberapa kalimat edukasi, imbauan, dan informasi. Seluruh bagian kewacanaan tersebut merupakan proses diskursif yang terjadi dalam struktur sosial.

Berdasarkan latar belakang pengetahuan masyarakat yang berbeda, respons terhadap kondisi kewacanaan juga berbeda, sehingga ideologi yang didistribusikan berbenturan dengan konsep pembawa ideologi awal. Dalam penelitian analisis wacana kritis dengan dimensi makrostruktural ditemukan (1) bentuk marginalisasi terhadap masyarakat, (2) dominasi pemerintah sebagai pemangku kekuasaan berkaitan dengan ideologi yang diterapkan. Kedua fenomena praktik sosiokultural tersebut menimbulkan sesuatu yang salah (*social wrong*) dalam memahami konsep ideologi masing-masing. Dalam dimensi makrostruktural, *social wrong*

merupakan bentuk temuan yang perlu diungkap.

Anomali perilaku yang ada dalam masyarakat dapat diperlihatkan dari bentuk-bentuk penolakan yang terjadi. Misalnya, aksi demonstrasi sampai pada aksi anarkistis. Penyebab perubahan perilaku ini merupakan proyeksi dari resistensi masyarakat terhadap ideologi pemerintah. Penyebabnya adalah 1) inkonsistensi pemerintah terhadap kebijakan yang diproduksi. Misalnya, terdapat pejabat pemerintah yang mengadakan pesta pernikahan dan ulang tahun. 2) Masyarakat menjadi korban kondisi. Hal ini terlihat dari pendekatan yang dilakukan aparat pelaksana regulasi berupa ancaman dan hukuman. 3) Kebijakan dianggap tidak efektif karena kemacetan dan titik kumpul massa lebih tinggi akibat adanya penyekatan jalan. 4) Pemerintah kurang melakukan langkah preventif terhadap kenaikan harga barang. Misalnya, sulitnya mendapatkan tabung oksigen. Kalau ada stok, pasti harganya melambung.

Titik akumulasi dari resistensi masyarakat terhadap pemerintah adalah bentuk-bentuk perlawanan terhadap kebijakan. Hal ini berwujud pada sikap ketidakpercayaan terhadap pemerintah, perlawanan terhadap satgas gabungan yang sedang beroperasi, dan sikap apatis masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Potret praktik sosial dan bentuk interaksi sosial semacam ini

dapat menimbulkan ketidakseimbangan kewacanaan sosiopolitik dan sosiokultural.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa teks SE PPKM Darurat yang dikeluarkan walikota Surabaya memiliki unsur berikut ini.

1. Mikrostruktural meliputi intepretasi teks yang saling berkolaborasi berdasarkan lingkup diskursif, yaitu bentuk-bentuk larangan dan hukuman (ideologi penguasa). Mediasi untuk meredam penolakan berupa kalimat-kalimat yang memiliki substansi edukasi, imbauan, dan informasi.
2. Mesostruktural meliputi hierarki sosial atas dan bawah. Terminologi "atas" berkaitan dengan walikota beserta jajarannya, memiliki dominasi ideologi kekuasaan yang menunjukkan identitasnya sebagai kaum berkuasa. Istilah "bawah" berelevansi dengan pengusaha, pemilik instansi, dan masyarakat kaum lemah yang menunjukkan identitas sebagai kaum tertindas yang harus mematuhi ideologi pemerintah.
3. Makrostruktural praktik sosiokultural adalah realitas wacana yang dibangun oleh pemerintah berupa kebijakan-kebijakan secara implisit bermuatan ideologi yang mengakibatkan bentuk: 1) marginalisasi terhadap masyarakat, 2) dominasi sosial. Sedangkan, masyarakat memiliki identitas sebagai kaum lemah dan

tertindas, bersikap apatis, tidak percaya dengan kebijakan. 3) Terdapat interaksisosial tidak seimbang (*social wrong*) berakibat pada bentuk-bentuk perlawanan berupa aksi demonstrasi dan aksi-aksi anarkistis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariefana, P. (2020, Maret 22). *Suarajatim.id*. Diambil kembali dari Surat Edaran Virus Corona Wali Kota Surabaya: Hentikan Posyandu Balita: <https://jatim.suaracom/read/2020/03/22/120334/surat-edaran-virus-corona-wali-kota-surabaya-hentikan-posyandu-balita?page=1>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineke Cipta.
- Bungsu, A. P. (2019, Desember). Citra KPK Pada Kasus Korupsi Menteri Juliari. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Vol. 1 No. 2*, 24.
- Caesareka, Y. W., & Nugroho, C. (2020, Edisi Juli-Desember). Komodifikasi Agama pada Produk Fashion (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough pada Desain Kaus 'Keepers of the Deen'). *LONTAR, Vol. 8 No. 2*.
- Chaer, A. (2007). *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Crystal, D. (1991). *A Dictionary of Linguistics and Phonetics*. Oxford: Basil Blackwell Ltd.
- Darma, Y. (2009). *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Harlow: Pearson.
- Fairclough, N. (2003). *Language and Power Relasi Bahasa, Kekuatan dan Ideologi*. Malang: Boyan Publishing.
- Fauzan, U. (2014). Analisis Wacana Kritis dari Model Fairclough hingga Mills. *Jurnal Pendidik, Vol. 6 No. 1*, 123-137.
- Firmansyah, M. B. (2018). Dimensi Sosial dalam Novel Negeri Para Bedebah. *KEMBARA: (Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya), Volume 4, Nomor 1*, 60-68. Dipetik September 28, 2021, dari <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/kembara/article/view/5845>
- Halliday, M. A. (1993). *Language as Social Semiotic, The Social Interpretation of Language and Meaning*. London: Open University Set Book.
- Halliday, M., & Ruqayya, H. (1992). *Bahasa, Konteks dan Teks, Aspek-aspek Bahasa Dalam (terjemahan oleh Asruddin Barori Tou)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Halwati, U. (2013). Analisis Foucault dalam Membedah Wacana Teks Dakwah di Media Massa. *At-Tabsyir, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, Volume 1, Nomor 1*, 145-158.
- Hamad, I. (2005). Lebih Dekat dengan Analisis Wacana. *Mediator, Vol. 8 No. 2*.

- Inggiz, R. T., Kushartono, T., & Amanita, A. (2019). Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 1 No. 1. Dipetik September 28, 2021
- Kartikasari, S. (2020, Juli-Desember 2). Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough terhadap Pemberitaan Jokowi Naikkan Iuran BPJS di Tengah Pandemi. *An-Nida*, 12.
- Kusno, A. (2015, Desember). Analisis Wacana Kritis Teks Berita Jawa Pos Terkait Penetapan Dahlan Iskan sebagai Tersangka Kasus Gardu Induk PLN dan Mobil Listrik (Sebuah Analisis Wacana Kritis). *Medan Makna*, Vol. XIII(2), 103-116.
- Leeuwen, V. T. (2008). *Discourse and Practice. New Tools for Critical Discourse*. New York: Oxford University Press.
- News, B. (2021, Juli 2). *PPKM darurat, pelaku usaha kecil menolak pembatasan kegiatan: 'Bisa kembali hancur lebur UMKM, kami dapat uang dari mana'*. Dipetik September 27, 2021, dari BBC News: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57650848>
- Pemerintah Kota Surabaya. (2021, Mei 24). Dipetik September 28, 2021, dari Antisipasi Lonjakan Kasus Covid 19: <https://surabaya.go.id/id/berita/60326/antisipasi-lonjakan-kasus-covid>
- Pemerintah Kota Surabaya. (2021, Juli). *Surabaya Tanggap Covid*. (Pemerintah Kota Surabaya) Dipetik September 20, 2021, dari Surabaya Lawan Covid 19: <https://lawancovid-19.surabaya.go.id/>
- Santoso, A. (2006). *Bahasa, Masyarakat dan Kuasa: Topik-topik Kritis dalam Kajian*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Saraswati, A., & Sartini, N. W. (2017). Wacana Perlawanan Persebaya 1927 terhadap PSSI: *Mozaik Humaniora*, Vol. 17 (2):181-191, 11.
- Suyanto, B. (2021, Juli 13). *Resistensi Masyarakat Menyikapi PPKM Darurat*. Dipetik September 25, 2021, dari Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/opini/418084/resistensi-masyarakat-menyikapi-ppkm-darurat>
- Tambayong, H., & Haryono, A. (2021, Juni). *697 Orang di Surabaya Meninggal akibat Covid-19 selama Juni 2021*. Dipetik September 27, 2021, dari iNewsJatim.id: <https://jatim.inews.id/berita/697-orang-di-surabaya-meninggal-akibat-covid-19-selama-juni-2021/2>

Widiyana, E. (2021, Juli 11). *Beredar Seruan Aksi Tolak PPKM Darurat di Surabaya*. Dipetik September 27, 2021, dari DetikNews:
<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5639591/beredar-seruan-aksi-tolak-ppkm-darurat-di-surabaya>